



**KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA WANAKARTA KECAMATAN LOLONG
GUBA KABUPATEN BURU**

***THE PERFORMANCE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE
IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT IN WANAKARTA VILLAGE,
LOLONG GUBA DISTRICT, BURU REGENCY***

Nurma Hidayati¹, Zainal Abidin Rengifurwarin², Julia Theresia Patty³

^{1,2,3}Universitas Pattimura

²rengifurwarinza58@gmail.com

³juliapatty321@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Wanakarta, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan model interaktif milik milles dan huberman yaitu mengadakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dimensi kinerja pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru berada dalam posisi cukup baik, terutama : a) dimensi produktivitas kerja, b) dimensi responsivitas kerja, c) dimensi akuntabilitas kerja. Kondisi ini didukung oleh faktor : a) tingkat pengetahuan, b) tingkat kemampuan, sedangkan dimensi kinerja pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Wanakarta yang belum memadai adalah dimensi tanggung jawab kerja. Kondisi ini terjadi karena kurang memperoleh dukungan dari faktor pendidikan yang dimiliki.

Kata Kunci: kinerja, pemerintah desa, pembangunan desa.

Abstract

This type of research is qualitative descriptive research that aims to determine the performance of village government in development in Wanakarta Village, Lolong Guba District, Buru Regency. The informants in this study amounted to 11 people. Data collection techniques were used in the form of observation, interviews, and documentation, as well as data analysis techniques using interactive models owned by Milles and Huberman, namely conducting data reduction, presenting data, and drawing conclusions. The research results obtained show that village government performance in development prioritizes community aspirations and participation, and the performance dimensions of implementing village development programs in Wanakarta Village, Lolong Guba District, Buru Regency are in a fairly good position, especially: a) work productivity dimensions; b) work responsiveness dimensions; and c) the dimensions of work accountability. This condition is supported by factors: a) level of knowledge; b) level of ability, while the dimension of performance in the implementation of village development programs in Wanakarta Village that is inadequate is the



dimension of work responsibility. This condition occurs due to a lack of support from educational factors.

Keywords: *performance, village government, village development.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu arah perkembangan administrasi publik pada saat ini mengacu pada profesionalisme kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik. Hal ini berorientasi pada fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat sampai daerah. Salah satu Instansi yang dibentuk oleh pemerintah di daerah yaitu desa.

Dewasa ini, kedudukan peranan desa berkembang pesat dan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan negara. Hal ini dikarenakan pada era pemerintahan presiden Joko Widodo, desa dijadikan ujung tombak dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

Menurut Sujadi, dkk “istilah desa berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah” sedangkan Hanif Nurcholis dalam Sujadi, dkk mengatakan bahwa: Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dalam mengatur kehidupannya dalam suatu desa diatur oleh pemerintah desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab 1 Pasal (3) dan (4). Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Dalam melaksanakan pembangunan maka pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Sebagaimana dikemukakan Fahmi (2013:2) bahwa “Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *Profit Oriented* dan *Non Profit Oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu.”

Untuk dapat menyelenggarakan pelaksanaan program pembangunan yang prima tidaklah mudah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guna melaksanakan program pembangunan yang baik. Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa perlu adanya dukungan dari berbagai faktor baik itu faktor individu maupun faktor kelompok atau organisasi. Pemerintah desa dalam hal ini merupakan organisasi, jadi kinerja pemerintah desa sama dengan kinerja organisasi. Ini berarti bahwa kinerja organisasi merupakan ukuran pencapaian suatu organisasi terhadap visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi sangat dibutuhkan karena jika kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah baik, maka pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dikategorikan baik.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik tentu adanya partisipasi masyarakat yang sadar dan peduli terhadap pentingnya pembangunan khususnya di desa yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat yang lebih baik.

Desa Wanakarta merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru. Desa Wanakarta terletak jauh dari pusat kota. Jarak tempuh dari desa ke kota sekitar 70km/jam dengan mengendarai sepeda motor. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai buruh tani, pedagang dan kuli bangunan.

Berdasarkan observasi awal penulis, pembangunan fisik di Desa Wanakarta masih jauh dari harapan masyarakat. Banyak masyarakat mengeluhkan bahwa kurangnya pelaksanaan pembangunan jalan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas pekerjaan. Selain pembangunan jalan, masyarakat juga mengeluhkan tentang pembangunan drainase. Yang mana drainase memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Sistem drainase yang baik membantu mencegah banyak persoalan, seperti mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air, tanah, erosi tanah dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan yang ada.

- Bidang Pembangunan 2018



No	Jenis Kegiatan	Prakiraan Biaya	Realisasi	Sumber Dana	Ket	Presentase
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton	117,832,800	117,832,800	DD	Dusun Padang Wulan	100%
2	Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong	15,043,400	15,043,400	DD	Dusun Padang Wulan	100%
3	Pembangunan Gorong-gorong	17,987,000	17,987,000	BHR/ BHP	Gedung Serba Guna	100%
4	Kegiatan Perbaikan Saluran Drainase	415,136,400	415,136,400	DD	Dusun Padang Wulan	100%

- Bidang Pembangunan 2019

No	Jenis Kegiatan	Prakiraan Biaya	Realisasi	Sumber Dana	Ket	Presentase
1	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	230.026.800	233.361100	DD	Desa Wanakarta	101,450%
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	73.309.411	69.870.000	DD	Desa Wanakarta	95,3%
3	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	83.454.600	83.088.500	DD	Desa Wanakarta	99,56%
4	Belanja Lampu Jalan Tenaga Surya	141.200.000	141.200.000	DD	Desa Wanakarta	100%

- Bidang pembangunan 2020

No	Jenis Kegiatan	Prakiraan Biaya	Realisasi	Sumber Dana	Ket	Presentase
1	Pembangunan MCK	114.293.000	52.473.000	DD	Desa Wanakarta	45,91%
2	Pembangunan Tempat Wisata Milik Desa	300.864.800	89.604.200	DD	Desa Wanakarta	29,78%
3	Pembangunan Tempat Wisata Milik Desa Tahap II	-	215.237.550	DD	Desa Wanakarta	α
4	Pembangunan Tempat Wisata Milik Desa Tahap III	-	76.703.000	DD	Desa Wanakarta	α

Sumber data: Kantor Desa Wanakarta, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pembangunan desa yang terjadi di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru ini belum sepenuhnya dirasakan, dimana dalam pembangunannya masih tertunda, ini disebabkan cuaca yang tidak menentu dan juga alternatif dari pemerintah desa belum dilakukan dengan baik. Pembangunan yang telah dimulai awal tahun 2018 hingga saat ini belum juga terealisasi penyelesaiannya.

Kinerja pemerintah yang baik sesuai dengan perencanaan dan anggaran tentu diharapkan bagi masyarakat, untuk itu pemerintah desa perlu melakukan perbaikan apabila dalam realisasinya terdapat



permasalahan. Pembangunan yang lambat tentu menjadi penghambat tumbuhnya ekonomi masyarakat desa, sehingga diperlukan langkah-langkah baik dalam mempercepat pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, gejala-gejala diatas dianggap penting dan menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru”**.

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sutrisno Kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Menurut Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Byar dan Rue mendefinisikan kinerja merupakan derajat penyelesaian tugas yang menyertai pekerjaan seseorang. Kinerja adalah yang merefleksikan seberapa baik seseorang individu memenuhi permintaan pekerjaan.

Menurut Notoatmodjo bahwa kinerja tergantung pada kemampuan pembawaan (*ability*), kemampuan yang dapat dikembangkan (*capacity*), bantuan untuk terwujudnya *performance* (*help*), insentif materi maupun nonmateri (*incentive*), lingkungan (*environment*), dan evaluasi (*evaluation*). Kinerja dipengaruhi oleh kualitas fisik individu (ketrampilan dan kemampuan, pendidikan dan keserasian), lingkungan (termasuk insentif dan noninsentif) dan teknologi.

Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Kinerja dimaknai dengan prestasi kerja dalam hal pelaksanaan tugas atau perintah, fungsinya, kewajiban untuk menepati janji serta proses tindakan yang diambil menurut kepuasan batin berdasarkan pikiran bebas pelaku pemerintahan yang bersangkutan dan kesiapan memikul segala resiko dan konsekuensi (Lexie).

Bernardin dan Russel seperti dikutip oleh Ruky mendefinisikan *performance* sebagai catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dan fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Kinerja dalam konteks prestasi kerja, menurut Gomes adalah suatu hasil yang dicapai sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Sedangkan menurut Siagian bahwa prestasi kerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku bagi pekerjaan.

Prestasi kerja pegawai negeri sipil adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menyebutkan bahwa pembinaan negeri sipil dilaksanakan berdasarkan system karir dan system prestasi kerja.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kinerja, *performance* atau prestasi kerja adalah penampilan kerja maupun hasil yang dicapai oleh seseorang baik barang/produk maupun berupa jasa yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian atas diri karyawan atau organisasi kerja yang bersangkutan yang mencerminkan pengetahuan karyawan tentang pekerjaannya itu. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas hasil kerjanya maka semakin tinggi pula kinerjanya.

Dalam suatu organisasi terdapat indikator kinerja yang dapat menjadi sumber acuan dari kinerja pegawai. Menurut Sedarmayanti indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun kegiatan selesai dan berfungsi.

Agus Dwiyanto menyebutkan empat indikator untuk menilai kinerja organisasi sektor publik sehingga dapat dideskripsikan bahwa suatu organisasi sektor publik dapat disebut atau dinilai memiliki kinerja tinggi atau kinerja rendah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:



- a. Productivity (produktivitas) adalah ukuran seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan sesuai yang diharapkan. Produktivitas merujuk pada hasil kerja dari pelayanan yang diberikan organisasi publik.
- b. Responsiveness (responsivitas) adalah ukuran kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, dengan kata lain responsivitas merupakan daya tanggap organisasi publik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.
- c. Responsibility (responsibilitas) adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas organisasi merujuk pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur dan taat kerja yang berlaku.
- d. Accountability (akuntabilitas) adalah ukuran seberapa kebijakan dan kegiatan sektor publik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di dalam dunia kerja, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan maupun dari diri karyawan itu sendiri serta dari lingkungan sekitar perusahaan. Jika kinerja karyawan baik, maka target dan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan akan lebih mudah tercapai. Demikian sebaliknya, jika kinerja karyawan buruk, maka target dan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan akan lebih sulit tercapai.

Faktor tingkat kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa, oleh para ahli sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Menurut Keith Davis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada dua, yaitu sebagai berikut: a) faktor kemampuan (ability) dan b) factor motivasi (motivation).

Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, adalah :

1. Faktor kemampuan (Ability)

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan, potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill). Artinya, pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.

2. Faktor Motivasi (Motivation)

Motivasi diartikan sebagai sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan organisasinya. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan, pola kerja dan kondisi kerja.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan pembangunan desa serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru.

b. Manfaat Penelitian



Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis atau akademik dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah referensi mengenai kinerja dalam pelaksanaan pembangunan desa, serta pengembangan faktor pendukung dan perbaikan faktor penghambatnya di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru pada perpustakaan FISIP Universitas Pattimura.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (input) bagi pemimpin yang berkompeten untuk merumuskan langkah kebijakan bagi upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan desa, serta pengembangan faktor pendukung dan perbaikan faktor penghambatnya di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru.

METODE

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi/tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berlokasi pada Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Wawancara (interiview)

Menurut Esterberg wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Dalam wawancara terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data yaitu:

- a. Membuat pedoman pertanyaan wawancara, sehingga pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tujuan wawancara tersebut.
- b. Menentukan narasumber wawancara.
- c. Menentukan lokasi dan waktu wawancara.Melakukan proses wawancara.
- d. Dokumentasi.
- e. Memastikan hasil wawancara telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
- f. Merekap hasil wawancara.

2. Observasi (mengamati)

Menurut Riyanto observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif . Dalam kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data.

Berdasarkan jenisnya observasi dibagi 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diselidiki.
- b. Observasi tidak langsung adalah pengamatan atau penelitian dilaksanakan pada saat tidak terjadinya suatu peristiwa yang akan diteliti misalnya melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto.



3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Arikunto (2000) metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, prasasti, notulen, rapor dan lain sebagainya. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa gambar-gambar, foto-foto, dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh objek dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian kualitatif.

Bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Penyajiannya memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi metode, reliabilitas serta validitas instrument yang digunakan dalam penelitian. Perlu juga dijelaskan bagaimana ragam populasi yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta proses sampling yang dilakukan.

Penentuan Informan

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan yang ditentukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua macam informan, yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi dan objek penelitian ini yakni : Kepala Desa Wanakarta sebagai informan kunci, sedangkan Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat Umum sebagai informan pendukung.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Sugiyono.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono). Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

Teknik Analisis Data

Didalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Huberman dan Miles mengajukan tiga model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini, terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi. Ketiga kegiatan ini merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman).

1. Reduksi Data

Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data maksudnya ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, pengabstrakan serta informasi data awal yang muncul dari hasil catatan tertulis lapangan.



2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Menarik kesimpulan ialah merupakan proses penjelasan, mencatat keteraturan yang berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Identitas Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari pemerintah desa Wanakarta dan masyarakat di desa Wanakarta.

Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut akan dijelaskan karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin yang digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah		Frekuensi	Presentase
		Pemerintah Desa	Masyarakat		
1	Laki-laki	3	5	8	73%
2	Perempuan	1	2	3	27%
Total		4	7	11	100

Sumber data: Kantor Desa Wanakarta, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa informan berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 8 orang (73 persen) sedangkan informan berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang (27 persen). Total keseluruhannya adalah 100 persen.

Informan Berdasarkan Usia

Berikut akan dijelaskan mengenai informan berdasarkan usia yang digambarkan pada tabel 4.21 berikut ini.

Tabel 2
Informan Berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah		Frekuensi	Presentase
		Pemerintah Desa	Masyarakat		
1	0-30	-	3	3	27%



2	31-40	3	-	3	27%
3	41-50	-	2	2	19%
4	51-60	1	2	3	27%
Total		4	7	11	100

Sumber data: Kantor Desa Wanakarta, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa informan dengan tingkatan umur antara 0-30 tahun berjumlah 3 orang atau 27 persen, informan dengan tingkatan umur antara 31-40 tahun berjumlah 3 orang atau 27 persen, informan dengan tingkatan umur antara 41-50 tahun sebanyak 2 orang atau 19 persen, informan dengan tingkatan umur antara 51-60 tahun sebanyak 3 orang atau 27 persen. Jadi total keseluruhannya ialah 100 persen.

Informan Berdasarkan Agama

Berikut akan dijelaskan jumlah informan berdasarkan agama, yakni sebagai berikut

Tabel 3
Informan Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah		Frekuensi	Presentase
		Pegawai	Masyarakat		
1	Islam	4	7	11	100%
Total		4	7	11	100

Sumber data: Kantor Desa Wanakarta, 2022

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa penduduk dengan agama islam berjumlah 11 orang (100 persen).

Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut akan dijelaskan mengenai informan berdasarkan tingkat pendidikan yang digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Agama	Jumlah		Frekuensi	Presentase
		Pegawai	Masyarakat		
1	SD	-	2	2	18%
2	SMP/Sederajat	-	1	1	9%
3	SMA/Sederajat	2	2	4	37%
4	Tamat sarjana S1	1	2	3	27%
5	Tamat sarjana S2	1	-	1	9%
Total		4	5	11	100

Sumber Data : Kantor Desa Wanakarta, 2022

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa informan dengan tingkat pendidikan SD/Sederajat sebanyak 2 orang (18 persen), informan dengan tingkat pendidikan SMP/Sederajat sebanyak 1 orang (9 persen), informan dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 4 (37 persen), informan dengan tingkat pendidikan Sarjana S1 sebanyak 3 orang (27 persen), dan Sarjana S2 sebanyak 1 orang (9 persen). Jadi total keseluruhannya adalah 100 persen.

Kinerja Pembangunan Desa

Berikut ini adalah ulasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan



pembangunan di Desa Wanakarta, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru. Kinerja Pemerintah Desa merupakan kemampuan kerja Pemerintah Desa.

Data yang berhasil dikumpulkan berkaitan dengan konsep yang dikaji melalui penelitian ini terdiri atas kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan menurut Agus Dwiyanto terdapat dimensi-dimensi yang menjadi tolak ukur indikator kinerja, yaitu produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Teori inilah yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Masing-masing konsep tersebut memiliki hasil analisa. Hasil analisa ini dipaparkan secara berurutan, sebagai berikut:

a. Produktivitas

Swastha dan Sukotjo berpendapat bahwa produktivitas adalah sebuah konsepsi yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Selanjutnya menurut Handoko produktivitas didefinisikan sebagai hubungan masukan-masukan dan keluarankeluaran suatu sistem produksi.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang ada agar lebih efektif dan efisien.

Produktivitas pemerintah desa dalam menyelesaikan pembangunan merupakan salah satu dimensi yang paling penting untuk melihat kinerja pemerintah desa. Dalam hal ini produktivitas adalah hasil (output) yang diperoleh dari program pembangunan yang sudah terlaksana di Desa Wanakarta. Setiap pembangunan yang berlangsung di desa Wanakarta merupakan suatu kebutuhan yang betul-betul berasal dari kebutuhan masyarakat dan prioritas kegiatan baik dalam penggunaan dan manfaatnya.

Untuk menyelesaikan suatu kegiatan pembangunan di Desa Wanakarta, pemerintah desa Wanakarta dan masyarakatnya mengaku bahwa dalam menyelesaikan pembangunan pemerintah desa Wanakarta selain berusaha mengoptimalkan waktu bekerja oleh pekerja di lapangan sesuai dengan waktu dalam kontrak kerja, dari pemerintah desa sendiri mengajak masyarakat bekerja sama dalam hal swadaya menyelesaikan suatu kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swadaya masyarakat sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu.

Dari hasil pendekatan wawancara pada indikator produktivitas pemerintah sudah cukup baik yang mana merupakan kemampuan pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan di desa Wanakarta. Jika kemampuan pemerintah desa dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan sudah sangat baik maka masyarakat akan menilai kinerja pemerintah desa sudah baik. Para pemerintah desa dikatakan sudah cukup baik dalam menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan desa.

b. Responsivitas

Pemerintah desa sebagai wadah dalam menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan. Kemudian kewajiban dari pemerintah desa itu sendiri adalah menindak lanjuti aspirasi masyarakat, tentunya dalam menindaklanjuti sebuah aspirasi itu adalah dengan, menentukan skala prioritas karena tidak semua aspirasi bisa dimasukkan ke dalam program khususnya dalam pembangunan.

Sikap daya tanggap merupakan hal yang harus dianggap penting. Sebab dengan adanya daya tanggap yang baik masalah akan mampu terselesaikan dan dapat menciptakan kualitas layanan yang baik. Sikap daya tanggap haruslah dimiliki oleh para penyelenggara pelayanan agar terciptanya akuntabilitas pada pelayanan publik.

Dari hasil pendekatan wawancara pada indikator Responsivitas di atas, Responsivitas pemerintah desa terkait dengan kemampuan pemerintah desa dalam menerima aspirasi dilihat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pada indikator responsivitas pemerintah desa sudah cukup baik dalam mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Namun sebelum menerima aspirasi masyarakat tentunya melewati proses menjangkau aspirasi masyarakat. Pemerintah desa harus sigap setiap



waktu, demikian yang dilakukan pemerintah desa Wanakarta. Selain menerima aspirasi masyarakat, pemerintah desa Wanakarta mengambil kebijakan untuk mengerahkan masing-masing ketua rukun tetangga (RT) untuk menggali aspirasi masyarakat di RT sesuai dengan kebutuhan dalam bidang pembangunan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di wilayah RT masing-masing.

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa, dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, Pemerintah Desa Wanakarta tidak semata-mata hanya melihat dari aspirasi langsung bisa dituangkan kedalam program pembangunan yang ada, tetapi dengan cara menentukan prioritas program akan menghasilkan program yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa.

c. Responsibilitas

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang yang sudah dipercayakan kepada setiap unsur pemerintah desa khususnya dalam pembangunan, responsibilitas pemerintah desa merupakan tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan mengenai kemampuan dalam memberikan informasi mengenai program-program pembangunan hingga proses penetapan program-program kerja dalam pembangunan desa.

Maka ini merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas, fungsi dan wewenang di dalam pembangunan. Tugas dan fungsi pemerintah desa di dalam menjalankan tugasnya dibidang pembangunan dengan tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa sendiri. Menurut aparat pemerintah Desa Wanakarta dari pemerintah desa sendiri memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan suatu kegiatan karena dengan cara itu tidak akan terjadi tumpang tindih masalah tanggungjawab yang sudah dibebankan kepada pemerintah desa.

Pada Pemerintah Desa Wanakarta di dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembangunan sendiri setiap unsur pemerintahan desa berusaha melakukan pekerjaan sesuai dengan beban pekerjaan yang sudah diberikan kepada mereka sebaik mungkin sehingga pada saat diminta tanggungjawab atas kepercayaan yang diberi khususnya dalam pembangunan maka setiap unsur pemerintahan bisa menunjukkan bagian-bagian yang dikerjakannya.

Pada indikator Responsibilitas belum terpenuhi secara maksimal karena kemampuan pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai program-program pembangunan belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat.

d. Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas menurut Astuti Dan Yulianto adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kemudian Miriam mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi kuasa atau mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi Dalam konteks pemerintahan Desa, salah satu tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan adalah menyelenggarakan administrasi kependudukan. Dalam menjalankan tugas tersebut, diharapkan memegang prinsip keterbukaan, ketanggapan, kreatifitas dan akuntabilitas dalam pelayanan dari segenap jajaran aparatur pemerintah desa.

Pemerintah desa bertanggungjawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur pemerintah desa yang dibebankan sebagai wujud tanggungjawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan kepada setiap pemerintah desa.



Melakukan pekerjaan terhadap setiap kegiatan yang berlangsung di desa baik pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam menjalankan tugas dan fungsi serta wewenang yang sudah dipercayakan kepada setiap unsur pemerintah desa khususnya dalam pembangunan, dalam indikator akuntabilitas disini dimaksud dengan tanggungjawab baik dari pemerintah desa itu sendiri hingga pada warga masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas ada indikator akuntabilitas dapat dilihat baik dari masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama menunjukkan tanggungjawab dan dan konsisten dalam melaksanakan program-program pembangunan yang ada.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan pembangunan di sebuah desa tentu akan terdapat faktor-faktor yang mampu mempengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut.

Menurut Keith Davis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada dua, yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi. Faktor kemampuan yaitu pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ *superior*, *very superior*, *gifted* dan *genius* dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, sehingga akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. Sedangkan faktor motivasi diartikan sebagai sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya.

Adapun faktor pendukung dan penghambat yang ada pada pelaksanaan pembangunan di desa Wanakarta adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan menurut Lestari dalam Wirawan adalah merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisasi.

Indikator tingkat pendidikan menurut Lestari dalam Edy Wirawan, yaitu :

1. Pendidikan Formal Indikator nya berupa pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh setiap pekerja yang meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan perguruan tinggi.
2. Pendidikan Informal Indikator nya berupa sikap dan kepribadian yang dibentuk dari keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, faktor tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan masyarakat.

b. Tingkat Pengetahuan

Pada faktor pengetahuan yaitu dimana tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan pemerintah desa mengenai tujuan dan sasaran program-program pembangunan di desa Wanakarta. Apabila masyarakat dan pemerintah desa tidak memiliki pengetahuan akan tujuan dan sasaran pembangunan, maka program-program pembangunan tidak akan terlaksana.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pemerintah desa sudah sangat baik. Pemerintah desa dalam menyusun program-program pembangunan selalu melibatkan semua elemen yang ada di desa, sehingga masyarakatnya mampu mengetahui dan memahami sasaran serta tujuan dari program-program pembangunan yang ada.

c. Tingkat Kemampuan

Faktor berikut yaitu faktor kemampuan, yaitu kemampuan pemerintah desa Wanakarta dalam menggerakkan masyarakat untuk turut serta melaksanakan program-program pembangunan di desa. Kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai sangatlah dapat mempengaruhi kinerja dalam



pelaksanaan pembangunan, para pegawai pemerintah desa dan masyarakat harus memiliki kemampuan yang baik didalam proses pelaksanaan pembangunan desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, pada faktor kemampuan baik kemampuan pemerintah desa hingga masyarakatnya cukup menunjang keberhasilan dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Artinya baik pemerintah desa maupun masyarakat mampu melaksanakan program-program pembangunan tersebut.

d. Pola Kerja

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa serta sekretaris desa dapat dilihat bahwa pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan tidak menggunakan pola-pola kerja tertentu, melainkan dalam pelaksanaannya pemerintah mengikuti berdasarkan jobdesk yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian lapangan yang telah ditampilkan diatas, maka tampak dengan jelas bahwa dimensi kinerja pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru berada dalam posisi cukup baik, terutama : a) dimensi produktivitas kerja, b) dimensi responsivitas kerja, c) dimensi akuntabilitas kerja. Kondisi ini didukung oleh faktor : a) tingkat pengetahuan, b) tingkat kemampuan, dan c) Pola Kerja.

Sedangkan dimensi kinerja pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru yang belum memadai adalah dimensi responsibilitas kerja. Kondisi ini terjadi karena kurang memperoleh dukungan dari faktor pendidikan yang dimiliki.

Dengan demikian hasil temuan dari pelaksanaan penelitian ini dalam mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Saifudin Jambi (2019), Sofyan Torau (2019), Maya Onibala (2018) dan Maya Rosalina (2018), yang pada intinya mengungkapkan bahwa tingkat kinerja pelaksanaan pembangunan di suatu desa dapat dilihat dari : a) dimensi produktivitas, b) dimensi responsivitas, c) dimensi akuntabilitas, dan d) dimensi responsibilitas. Yang mana dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yaitu : a) tingkat pengetahuan, b) tingkat kemampuan, c) pola kerja, dan d) tingkat pendidikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan hasil peneliti mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru, maka ditemukan beberapa kesimpulan khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Produktivitas Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Pembangunan, di Desa Wanakarta pemerintah desa betul-betul melihat dari segi kebutuhan bukan keinginan, penggunaan dan manfaat bagi masyarakat sudah cukup baik. Untuk kegiatan lapangan pemerintah desa. Jika ada kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swadaya maka pemerintah desa mengajak masyarakat untuk bekerja sama menyelesaikan program pembangunan.
- b. Responsivitas Pemerintah Desa Wanakarta dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dinilai sudah baik. Aspirasi akan ditindaklanjuti dalam musrenbang desa untuk diusulkan dalam program pembangunan di desa tidak serta merta semua aspirasi bisa masuk kedalam program pembangunan karena aspirasi akan dinilai dari segi kebutuhan masyarakat bukan dari keinginan yang kemudian menjadi prioritas pembangunan di desa. Pemerintah Desa Wanakarta sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas, wewenangnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai bukti kinerja Pemerintah Desa mengutamakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di desa.



- c. Responsibilitas pada desa Wanakarta belum terpenuhi secara maksimal karena para pemerintah desa dalam memberikan informasi belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat.
- d. Akuntabilitas pada desa Wanakarta dapat dilihat baik dari masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama menunjukkan tanggungjawab dan dan konsisten dalam melaksanakan program-program pembangunan yang ada.

Dalam pelaksanaan pembangunan di sebuah desa tentu akan terdapat faktor-faktor yang mampu mempengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan tersebut. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang ada pada pelaksanaan pembangunan di desa Wanakarta adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat pendidikan, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan faktor tingkat pendidikan menjadi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat.
- b. Tingkat pengetahuan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta pemerintah desa sudah sangat baik. Pemerintah desa dalam menyusun program-program pembangunan selalu melibatkan semua elemen yang ada di desa, sehingga masyarakatnya mampu mengetahui dan memahami sasaran serta tujuan dari program-program pembangunan yang ada.
- c. Tingkat kemampuan, kemampuan yang dimiliki pemerintah desa hingga masyarakatnya cukup menunjang keberhasilan dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Artinya baik pemerintah desa maupun masyarakat mampu melaksanakan program-program pembangunan tersebut.
- d. Pola kerja, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa serta sekertaris desa dapat dilihat bahwa pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan tidak menggunakan pola-pola kerja tertentu, melainkan dalam pelaksanaannya pemerintah mengikuti berdasarkan jobdesk yang ditetapkan oleh pemerintah.

Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan yang di paparkan diatas, maka dapat dikemukakan sejumlah saran dan rekomendasi penelitian sebagai berikut :

- 1. Diharapkan kepada kepala desa atau pimpinan yang berkompeten dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat kinerja pelaksanaan program pembangunan di Desa Wanakarta Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru, terutama dari dimensi: 1) produktivitas kerja, 2) responsivitas kerja, 3) responsibilitas kerja, dan 4) akuntabilitas kerja.
- 2. Untuk lebih meningkatkan tingkat kinerja pelaksanaan program pembangunan desa seperti dikemukakan diatas, maka beberapa hal yang perlu ditempuh dan dilakukan adalah: a) mendorong peningkatan tingkat pendidikan warga masyarakat kedepan, b) peningkatan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai teknis dan totalitas kerja yang dibutuhkan, c) peningkatan tingkat kemampuan atau kapasitas kerja warga masyarakat melalui pelibatan melalui bimbingan dan penyuluhan, dan d) peningkatan pengembangan pola kerja yang produktif bagi warga masyarakat desa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Borni Kurniawan, desa Mandiri, desa Membangun, Jakarta: Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Fauzi Akhmad dan Rusdi Hidayat Nugroho, 2020. Manajemen Kinerja, Airlangga University Press, 2020.
- Irfan, 2019. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.



- Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Unpatti, 2019. Pedoman Penulisan Skripsi, Pattimura University Press, Ambon.
- Maya Onibala, 2018. Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso, Jurnal program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Maya Rosalina, 2018. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kuala Lapang Dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sofyanto Torau, 2019. Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur.

Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 20 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 23 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa

Internet

- Kusnendar, 2018. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, (<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1661>, diakses 20 Februari 2022).
- HA GINTING, 2019. Kinerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Lau Cimba Kabanjahe, (<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/168/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada 20 Februari 2022)
- Universitas Medan Area, 2020. BAB II LANDASAN TEORI, (http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1284/5/118320089_file5.pdf, diakses pada 26 Februari 2022)
- Abdul Rasyid, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Pola Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Tata Usaha Smpn Di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, (<https://media.neliti.com/media/publications/138182-ID-pengaruh-gaya-kepemimpinan-dan-pola-kerj.pdf>, diakses pada 28 Februari 2022)
- Riadi, Muchlisin. (2020). Penilaian Kinerja (Pengertian, Tujuan, Kriteria dan Metode). Diakses pada 7/16/2022, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/03/penilaian-kinerja-pengertian-tujuan-kriteria-dan-metode.html>

